



Bedah Rumah

Bantuan Provinsi

Dipotong Rp 4,5 Juta

Tabanan (Bali Post) -

Warga penerima bantuan program bedah rumah Provinsi Bali 2015 di Desa Kebon Padang, Kecamatan Pupuan, Tabanan, mengeluhkan dana yang diduga dipotong oleh perbekel setempat. Dari total anggaran Rp 30 juta dipotong Rp 4,5 juta per rumah.

Alasan pemotongan tersebut tidak jelas disampaikan oleh warga penerima bantuan. "Kantanya untuk biaya administrasi, itu saja," ujar salah satu warga yang enggan namanya dikorbankan, Selasa (10/11) kemarin. Ada tiga warga yang mendapatkan bantuan bedah rumah yang diduga disunat. Pemotongan dana ini sudah pernah dilaporkannya,

namun tidak mendapatkan tanggapan.

Dikonfirmasi terpisah, Perbekel Desa Kebon Padang I Made Arif Hartawan membantah tuduhan tersebut. "Tidak ada pemotongan, hanya dikenai pajak. Semua ada laporannya," tegasnya. Ditanya berapa besarnya pajak yang dikenakan, calon perbekel *incumbent* yang

terpilih lagi itu mengaku tidak mengetahui dengan pasti.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabanan I Nyoman Gede Gunawan mengatakan, meski bukan ranah kabupaten karena bantuan ini dari provinsi, pihaknya sudah memerintahkan stafnya untuk mengecek kebenarannya di lapangan. "Tidak ada potongan

administrasi. Yang ada pembayaran pajak dan ongkos tukang. Pajaknya saja 11 persen dari Rp 30 juta dan ongkos tukang. Yang namanya dana pemerintah pasti kena pajak," jelasnya.

Sementara jika dananya berasal dari CSR, ini murni perusahaan atau swasta yang peduli. "Jadi, tidak ada hubungannya dengan kedinasan. Kami hanya sebatas koordinasi tentang data rumah yang mau dibedah, pengelolanya oleh CSR itu sendiri," ungkapinya.

Mantan Kadisdukcapil Tabanan itu menjelaskan, untuk program bedah rumah yang dananya berasal dari provinsi, Disos Tabanan memang tidak dilibatkan dalam monitoring. Sudah ada tim khusus dari Provinsi Bali mengingat pengerjaannya dengan sistem swakelola. "Yang jelas itu dikelola oleh desa. Meski demikian, jika ada informasi yang melenceng tentu saja kami akan mengecek dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Bali," tambah Gunawan. (kmb28)

Edisi : Rabu, 11 November 2015

Hal : 14



Pascatemuan BPK

Seluruh Galian C Bodong akan Ditutup

Amlapura (Bali Post) -

Maraknya galian C tanpa izin alias bodong mulai disikapi serius Pemkab Karangasem. Setelah menjadi temuan BPK tahun ini, seluruh lokasi galian C bodong rencananya segera ditutup. Pasalnya, galian C bodong jelas sangat merugikan pemerintah daerah dan mempercepat rusaknya lingkungan sekitarnya.

Rencana ini dibenarkan Kasat Pol. PP Pemkab Karangasem, Iwan Supartha, saat dihubungi Selasa (10/11) kemarin. Namun, sebelum melakukan upaya penutupan, Tim Yustisi Pemkab Karangasem melakukan sosialisasi kepada seluruh pengusaha galian C maupun yang berada di dalam paguyuban serta warga sekitarnya. Seperti yang dilakukan Selasa kemarin, Tim Yustisi mensosialisasikan rencana ini di pusat galian C Desa Sebudi Kecamatan Selat, agar para pengusaha tidak kaget setelah nantinya Pemkab Karangasem mengambil keputusan tegas ini.

BPK sebelumnya dalam temuannya meminta Pemkab Karangasem segera melakukan tindakan tegas terhadap galian C bodong. Sebab, galian C tak berizin jelas merugikan pemerintah daerah. Namun, Iwan Supartha menambahkan, Pemkab Karangasem memohon agar penertiban galian C bodong itu bisa ditunda, dengan beberapa pertimbangan. Selain diperlukan sosialisasi kepada pengusaha dan warga, juga atas pertimbangan stabilitas poli-

tik di Karangasem, yang saat ini sedang panas menjelang Pilkada Karangasem. Bila langsung dilakukan tindakan tegas tanpa ada sosialisasi lebih dulu, dikhawatirkan menimbulkan gejolak warga dan mengganggu fokus pengamanan pilkada Karangasem.

"Sekarang kami sosialisasikan dulu, agar keputusan ini dapat dimengerti semua pihak," katanya. Keputusan ini jelas berat bagi pengusaha maupun warga setempat. Pasalnya, usaha galian C menjadi satu-satunya mata pencaharian mayoritas warga di Kecamatan Selat. Namun, Iwan mengklaim, saat dilakukan sosialisasi pihak pengusaha dan warga setempat tidak memberikan perlawanan. Mereka menerima keputusan pemerintah daerah. Namun, warga meminta waktu mengikuti keputusan pemerintah daerah. Iwan Supartha menambahkan, sosialisasi juga akan dilakukan di lokasi galian C bodong lainnya. Seperti di Kecamatan Rendang, Bebandem, dan Kubu, sebelum diputuskan akan ditutup total.

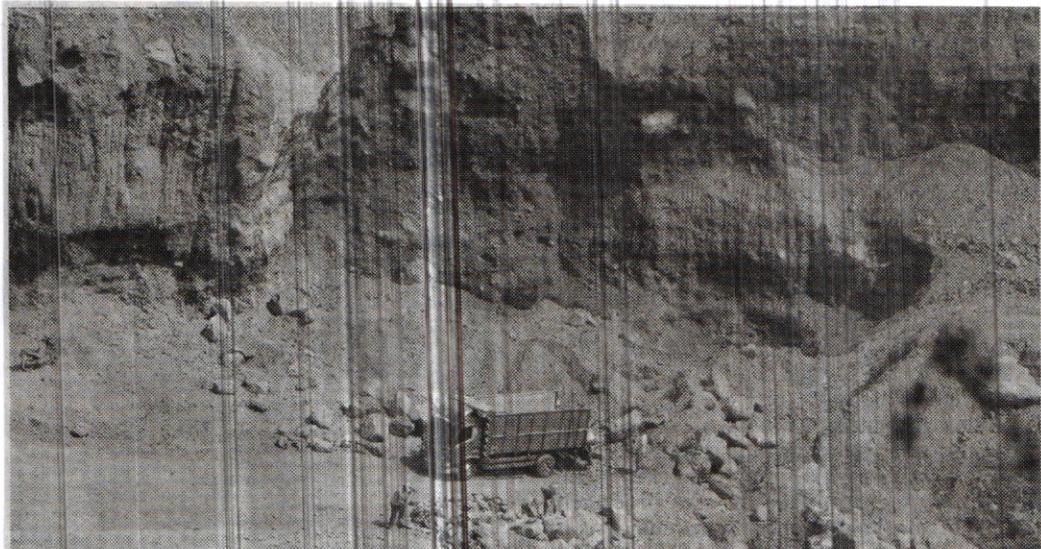
Dari pengamatan, setiap

Edisi : Rabu, 11 November 2015

Hal : 13



sambungan - - -



Bali Post/gik

TRUK GALIAN C - *Salah satu truk galian C mengangkut material pasir di lokasi galian C Sebudi Kecamatan Selat.*

hari ribuan truk hilir mudik mengangkut pasir hasil galian. Begitu juga dengan aktivitas mesin dan alat berat yang meraung-raung sepanjang hari mengeruk permukaan kaki Gunung Agung. Khusus di Desa Sebudi, meski sudah melewati batas pengerukan hingga 500 meter, namun pengerukan tetap berlangsung hingga kini sudah mencapai kedalaman 700 meter. Penjabat Perbekel Desa Sebudi, I Gusti Ngurah Dyumatsna, pernah mengatakan saat ini ada sekitar 34 titik lokasi galian C di desa setempat.

Namun, pihaknya tentu

tidak bisa berbuat banyak, karena usaha galian C menjadi wewenang pemerintah daerah. Kepala KPPT Karangasem, I Ketut Sumarta, mengakui, pihaknya sudah tidak menerbitkan izin lokasi galian di Kecamatan Selat (Desa Sebudi). Demikian juga di Kecamatan Rendang, karena sudah tidak memenuhi syarat ketinggian maksimal 500 meter, sebagaimana diatur dalam Perda RTRW Kabupaten nomor 17 tahun 2012. Dari 36 izin yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), hanya dua di antaranya berada di Kecamatan Bebandem.

Yakni, atas nama I Nengah Birit dengan nomor izin 16/KPPT/2014 seluas satu hektar. Kedua, atas nama I Gusti Made Tusan (PT Dharma Bhuana Karya) dengan nomor izin 01/KPPT/2015 tertanggal 15 Januari 2015. Sedangkan, 34 izin lainnya tersebar untuk sejumlah lokasi galian di Kecamatan Kubu. Seperti di Desa Tulamben (Banjar Dinas Batudawa Kelod), Baturunggit (Banjar Dinas Baturunggit Kelod), Sukadana (Banjar Dinas Mekar Sari, Lebah, Tigaron, Bukit, Nusu,) dan Tianyar (Banjar Dinas Dharma Winangun). (kmb31)



RUANG GURU - Proyek ruang guru SMPN 2 Nusa Penida yang disidak Komisi II DPRD Klungkung, Selasa (10/11) kemarin.

Bali Post/kmb

Proyek Ruang Guru SMPN 2 Nusa Penida Buruh Libur, Papan Proyek Tak Dipasang

Semarang (Bali Post) -

Pelaksanaan proyek tahun 2015 di wilayah Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, tidak berjalan mulus. Salah satunya di SMPN 2 Nusa Penida. Pembangunan ruang guru di sekolah ini berjalan molor. Hal ini sangat disayangkan Komisi II DPRD Klungkung yang melakukan sidak, Selasa (10/11) kemarin.

Saat disidak, tidak satu pun tukang atau buruh yang bekerja. Padahal *deadline* pembangunan ruang guru berlantai dua tersebut tinggal delapan hari lagi. Mirisnya lagi, pihak konsultan pengawas juga tidak ada di tempat. Papan proyek tidak dipasang. Malah, anggota DPRD menemukan papan proyek di bawah. "Kami mencari-cari papan proyeknya dan ketemu. Kondisinya kotor, lalu kami bersihkan. Seharusnya papan proyek dipasang agar

masyarakat tahu," tegas Ketua Komisi II DPRD Klungkung Gede Gita Gunawan.

Pembangunan ruang guru SMPN 2 Nusa Penida sudah dipastikan molor. Karena sesuai perencanaan seharusnya proyek ini sudah berjalan 70 sampai 80 persen. Akan tetapi, sampai sekarang baru berjalan sekitar 40 persen. Dia pesimis proyek dapat dikerjakan tepat waktu. Apalagi batas waktu pelaksanaan sampai 18 November. "Bagaimana mau

menyelesaikan tepat waktu. Sekarang saja tidak ada yang bekerja. Kalau ingin cepat selesai, harusnya pekerja ditambah," katanya.

Gita berharap pihak sekolah hanya membayarnya sesuai pekerjaan. Apalagi proyek tersebut dikerjakan swakelola. Ia dan anggota Komisi B lainnya Wayan Buda Parwata melihat hal ini sebagai kesalahan dan tanggung jawab pihak konsultan pengawas, sebab pihak kepala sekolah tidak

Edisi : Rabu, 11 November 2015

Hal : 10



Sambungan ---

paham mengenai pelaksanaan proyek.

Menurut dia, tidak masuk akal terlambatnya proyek akibat lambatnya faktor pengamperahan. "Katanya tadi alasannya karena faktor pengamperahan. Bagi kami tidak ada alasan, karena proyek tersebut sudah ada perencanaan," ujar Gita.

Proyek ruang guru di SMPN 2 Nusa Penida bersumber dari dana DAK 2015. Proyek berlantai II ini dianggarkan Rp 589.358.000. Proyek dikerjakan secara swakelola selama 90 hari kalender dari 18 Agustus sampai 18 November.

Rombongan Komisi II DPRD Klungkung juga melakukan sidak pembangunan ruang

belajar di SMKN Nusa Penida. Di lokasi ini, mereka tidak menemukan keganjilan pengerjaan proyek ruang belajar yang juga bersumber dari dana DAK. Gita yakin pembangunan ruang belajar yang menelan dana sekitar Rp 1 milyar ini dapat dikerjakan tepat waktu. Apalagi batas waktu pelaksanaan proyek sampai Desember.

Kadisdikpora Klungkung Nyoman Mudarta tidak banyak komentar terkait proyek SMPN 2 Nusa Penida. Namun, ia mengaku sudah tahu terkait molornya pengerjaan proyek. Pihaknya telah memerintahkan kabid yang membidangi untuk turun ke lapangan mencari informasi. (krab)



RAPBD 2016 Digodok, ✓ PAD Denpasar Dirancang Turun

Denpasar (Bali Post) -

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 mulai digodok Badan Anggaran DPRD Denpasar. Dalam draf tersebut, tim badan anggaran eksekutif memprediksi PAD Denpasar pada 2016 mendatang Rp 715 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan dari APBD 2015 (perubahan) yang menargetkan Rp 719 miliar, sedangkan pada APBD 2015 (Induk) Rp 681 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Denpasar I.B. Kompyang Wiranata yang ditemui di kantornya, Selasa (10/11) kemarin mengatakan, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai tahun depan tidak akan memberikan kontribusi yang besar. Sebab, untuk peralihan hak kepada ahli waris tidak kena biaya. Karena itu, terjadi perubahan pada posisi PAD tahun depan.

Kompyang Wiranata men-

gatakan, secara umum kerangka pajak BPHTB yang akan diberlakukan mulai tahun 2016 mendatang, tak membuat target PAD Kota Denpasar menjadi menurun.

Dikatakannya, untuk menopang target tersebut, pendapatan yang bersumber dari pajak hotel masih menjadi andalan. Tahun 2016 mendatang, kontribusi pajak hotel ditargetkan Rp 122 miliar lebih. Sedangkan kontribusi pajak restoran Rp 70 miliar lebih. Sementara terkait dengan belanja langsung, Kompyang Wiranata mengatakan, memang dalam Rancangan APBD 2016 lebih kecil dibandingkan dengan belanja tak langsung. Belanja langsung dirancang Rp 698,64 miliar, sedangkan belanja tak langsung Rp 1,125 triliun.

Menurut Kompyang Wiranata, perbedaan ini disebabkan belanja hibah dan belanja bantuan keuangan masuk dalam belanja tak

langsung. Mengingat dana itu nantinya akan dialokasikan untuk masyarakat, idealnya bantuan hibah masuk dalam belanja langsung. Namun sesuai ketentuan undang-undang, dana hibah dan bantuan keuangan harus dicantumkan dalam belanja tak langsung. "Tahun 2016 nanti dana hibah dirancang Rp 37,66 miliar lebih dan belanja bantuan keuangan Rp 125,66 miliar lebih. Hal inilah menyebabkan mengapa belanja langsung lebih kecil dibandingkan belanja tak langsung," ujar Kompyang Wiranata.

Meski belanja langsung lebih kecil dibandingkan dengan belanja tak langsung,

lanjut Kompyang Wiranata, dalam pembahasan intern, pos-pos tersebut tidak akan dibahas lagi. Mengingat, hal itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Anggota dewan lainnya, Hilmun Nabi, menyayangkan pola pembahasan untuk RAPBD ini kurang maksimal. Terutama, keterlibatan pihak Dewan yang masih minim. Seharusnya, Dewan bisa masuk dalam pembahasan awal setelah KUA dan PPAS diserahkan ke Dewan. "Kami merasa tidak terlibat banyak dalam penyusunan RAPBD ini, karena yang masuk ke dewan sudah hampir rampung," katanya.

(kmb12)

Edisi : Rabu, 11 November 2015

Hal : 7